KOMISI V
Infrastruktur dan Perhubungan

Analisis Strategis terhadap Isu Aktual
INFO Singkat
VOL. XVIII NO.2/II/PUSAKA/JANUARI/2026

PERCEPATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI RUMAH PASCABENCANA SUMATRA

Rafika Sari*

Abstrak

Pascabencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Sumatra, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah menjadi prioritas nasional untuk menjamin pemulihan sosial dan ekonomi masyarakat terdampak. Tulisan ini bertujuan menganalisis upaya percepatan tersebut serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Temuan menunjukkan adanya tantangan signifikan berupa ketidaksinkronan data kerusakan rumah antara pemerintah pusat dan daerah, lambatnya pencairan anggaran, kebutuhan pendanaan yang besar, serta belum meratanya penerapan prinsip build back better yang berdampak pada kualitas dan ketahanan rumah hasil rekonstruksi. Perbedaan kapasitas teknis daerah dan lemahnya pengawasan konstruksi turut memperlebar kesenjangan kualitas pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini merekomendasikan penguatan peran Komisi V DPR RI melalui fungsi legislasi untuk memperkuat regulasi dan standar rumah tahan bencana, fungsi anggaran untuk mengawal alokasi APBN agar tepat sasaran dan berkelanjutan, serta fungsi pengawasan untuk memastikan kualitas hasil rekonstruksi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan pemulihan pascabencana.

Pendahuluan

Pascabencana hidrometeorologi yang melanda berbagai wilayah di Sumatra, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah menjadi agenda prioritas dalam kebijakan nasional penanggulangan bencana. Pemerintah menempatkan pemulihan sektor permukiman sebagai langkah strategis untuk menjamin keberlanjutan kehidupan sosial dan pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat terdampak. Kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana serta kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi yang dikoordinasikan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dalam implementasinya, pemerintah daerah didorong untuk melakukan percepatan melalui penyederhanaan prosedur birokrasi, penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, serta optimalisasi dukungan anggaran dari pemerintah pusat (Uzma, 2026). Namun demikian, upaya percepatan tersebut masih menghadapi tantangan mendasar, terutama terkait inkonsistensi data kerusakan rumah yang menjadi basis perencanaan program rehabilitasi dan rekonstruksi.

BNPB mencatat hingga 17 Desember 2025 terdapat sekitar 147.000 unit rumah rusak akibat banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ("Sebanyak 147 ribu", 2026). Namun, data Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP)

*) Analis Legislatif Ahli Madya Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan pada Pusat Analisis Keparlemenan Badan Keahlian DPR RI. *Email:rafika.sari@dpr.go.id*

per 9 Januari 2026 menunjukkan angka lebih tinggi, yakni sekitar 189.308 unit rumah terdampak (Azhar, 2026). Perbedaan data ini mencerminkan proses pemutakhiran yang belum sepenuhnya sinkron dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam penetapan prioritas wilayah, alokasi anggaran, serta penjadwalan rehabilitasi dan rekonstruksi. Berdasarkan kondisi tersebut, tulisan ini menganalisis pemulihan pascabencana di Sumatra beserta tantangan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah yang berkualitas, akuntabel, dan berkelanjutan.

Pemulihan Pascabencana di Sumatra

Hingga saat ini masih terdapat 15 kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang belum sepenuhnya pulih pascabencana. Di Provinsi Aceh, terdapat tujuh daerah yang masih berada dalam tahap pemulihan, yaitu Aceh Timur, Aceh Tengah, Aceh Utara, Gayo Lues, Aceh Tamiang, Bener Meriah, dan Pidie Jaya. Sementara itu, di Provinsi Sumatera Utara, lima daerah tercatat masih terdampak, meliputi Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, dan Kota Sibolga. Adapun di Provinsi Sumatera Barat, terdapat tiga daerah yang belum pulih sepenuhnya, yakni Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang, dan Kota Pariaman, dengan Kabupaten Agam dilaporkan sebagai wilayah dengan tingkat dampak dan kebutuhan pemulihan paling berat (Pangesti, 2026).

Kondisi ini menunjukkan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah-wilayah terdampak masih memerlukan perhatian dan intervensi kebijakan yang berkelanjutan, khususnya untuk mempercepat pemulihan permukiman, memulihkan aktivitas sosial-ekonomi masyarakat, serta mengurangi risiko kerentanan terhadap bencana lanjutan. Dalam percepatannya, Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan Pascabencana (Galapana) dibentuk oleh DPR RI untuk mendukung dan mengawasi kinerja pemerintah dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana, terutama di wilayah Sumatera, agar berjalan tepat sasaran, akuntabel, dan sesuai kebutuhan daerah.

Satgas Galapana DPR RI menyatakan bahwa ada beberapa hal yang harus segera ditindaklanjuti. *Pertama*, normalisasi sungai, mengingat sejumlah alur sungai di wilayah terdampak berpotensi memicu banjir susulan akibat terhambatnya aliran air oleh tumpukan kayu dan material lainnya, terutama pada saat curah hujan tinggi. Normalisasi sungai merupakan langkah preventif yang bersifat prioritas, karena berhubungan langsung dengan upaya pencegahan risiko bencana lanjutan serta menjamin keamanan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. *Kedua*, pembukaan akses khususnya jalan menuju wilayah yang masih terisolasi. *Ketiga*, penyediaan hunian sementara (huntara), termasuk rencana penyediaan hingga 15 ribu unit. Satgas ini berperan dalam menyelesaikan kendala pembangunan terkait pengadaan lahan, seperti yang sempat terjadi di Aceh Tamiang. *Keempat*, pembersihan rumah warga yang terdampak, khususnya yang masuk dalam kategori rusak ringan, sehingga dapat mengurangi kebutuhan masyarakat terhadap hunian sementara.

Tantangan Rekonstruksi dan Rehabilitasi Rumah Pascabencana di Sumatra

Proses rekonstruksi dan rehabilitasi rumah pascabencana di Sumatra menghadapi sejumlah tantangan struktural dan teknis. *Pertama*, besarnya kebutuhan pendanaan menjadi kendala utama. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Daerah Agus Harimurti Yudhoyono menyebutkan bahwa pemulihan infrastruktur yang rusak akibat bencana di Sumatra mencapai Rp51 triliun (lebih dari USD3 miliar) dengan perbaikan infrastruktur khususnya jalan raya sebagai prioritas utama akses darat untuk mendistribusikan logistik dan mengangkut alat berat ("Indonesia estimates", 2025). Pembangunan hunian sementara (huntara) dan persiapan lahan untuk perumahan permanen menjadi bagian dari rencana pemulihan pascabencana sesuai arahan BNPB, di mana perbaikan rumah termasuk di dalamnya yang dilakukan secara bertahap dan diprioritaskan setelah data rumah rusak terverifikasi dan lahan siap dibangun ("Home ministry urges swift data", 2025).

Kedua, ketidaksinkronan data kerusakan rumah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menimbulkan kesulitan dalam penentuan prioritas penanganan dan alokasi sumber daya. Pemerintah berupaya memperkuat integrasi data kebencanaan lintas kementerian dan lembaga, termasuk BNPB, BPS, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum, serta pemerintah daerah, untuk menghasilkan satu rujukan data yang konsisten. Upaya ini dilakukan melalui rapat koordinasi dan pengembangan dashboard penanganan bencana guna mendukung pengambilan kebijakan terpadu dari tahap tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi. Namun, dalam implementasinya, langkah tersebut belum sepenuhnya mampu mengatasi disparitas data serta tumpang tindih peran di lapangan (Kemenko PMK, 2025).

Ketiga, tantangan teknis terkait kualitas bangunan pascarekonstruksi serta ketimpangan penanganan rumah rusak ringan, sedang, dan berat masih menjadi isu krusial seperti dialami pada kasus gempa Yogya pada tahun 2006. Ketegori ini penting karena mempengaruhi jumlah bantuan rehab rekon rumah terdampak bencana. Perbedaan kualitas hasil rekonstruksi berpotensi menurunkan ketahanan rumah terhadap bencana di masa depan, sementara ketimpangan distribusi bantuan dapat memicu rasa ketidakadilan di kalangan masyarakat terdampak, yang pada akhirnya memperlambat pemulihan sosial dan ekonomi secara menyeluruh.

Penerapan prinsip *build back better* menjadi prasyarat penting dalam rekonstruksi rumah di kawasan rawan bencana. Akademisi Fakultas Teknik Universitas Andalas, Prof. Taufika Ophiyandri, menekankan bahwa prinsip ini krusial untuk memastikan resiliensi hunian pascabencana, mengingat Indonesia termasuk negara dengan tingkat risiko bencana yang sangat tinggi secara global (Zulfikar, 2025; World Risk Report, 2024). Dengan demikian, pembangunan rumah pascabencana tidak dapat dipahami semata sebagai pemulihan fisik, melainkan sebagai fondasi awal dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana di masa depan.

Namun penerapan prinsip *build back better* belum terinternalisasi secara merata. Sejumlah program masih dilaksanakan tanpa kerangka kerja teknis yang terarah, sehingga keberhasilan pembangunan rumah kerap diukur dari jumlah unit yang selesai dibangun, bukan dari kualitas dan ketahanannya. (Zulfikar, 2025). Tekanan percepatan pembangunan dalam beberapa kasus berdampak pada penurunan mutu konstruksi, baik dari aspek material, struktur, maupun kepatuhan terhadap standar teknis rumah sederhana tahan bencana, termasuk acuan SNI dan peraturan teknis kementerian terkait.

BNPB telah melakukan pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) hingga tingkat desa untuk memastikan pemenuhan kriteria teknis dan konsistensi data. Meski demikian, kualitas pelaksanaan rekonstruksi masih bervariasi antar daerah. Di sejumlah wilayah, pembangunan rumah pascabencana cenderung berorientasi pada pemenuhan hunian jangka pendek, dengan perhatian terbatas terhadap aspek keselamatan, keberlanjutan, dan adaptasi terhadap risiko bencana lokal (Dewi, 2025). Oleh karena itu, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi perlu diimbangi dengan penguatan standar teknis, pendampingan konstruksi, dan pengawasan berkelanjutan agar pemulihan yang dilakukan benar-benar menjamin keamanan dan keberlanjutan kehidupan masyarakat terdampak.

Penutup

Percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah pascabencana memerlukan penguatan tata kelola yang berbasis data dan berorientasi pada hasil. Hal ini dapat dilakukan melalui penyediaan satu basis data nasional yang terintegrasi antara BNPB, Kementerian PKP, dan pemerintah daerah, serta penyesuaian skema anggaran yang adaptif terhadap tingkat kerusakan, karakter wilayah, dan indeks risiko bencana. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi kendala berupa disparitas dan keterlambatan data, keterbatasan kapasitas teknis daerah, serta koordinasi lintas sektor yang belum optimal.

Dalam konteks tersebut, Komisi V DPR RI memegang peran strategis untuk memastikan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan efektif melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Penguatan regulasi penanganan pascabencana dan standar rumah tahan bencana, pengawalan alokasi APBN agar tepat waktu dan tepat sasaran, serta pengawasan terhadap pelaksanaan program, termasuk evaluasi kualitas rumah hasil rekonstruksi, menjadi instrumen penting. Selain itu, keberadaan Satgas Galapana DPR RI yang melibatkan lintas komisi dapat memperkuat koordinasi, pengawasan lapangan, dan percepatan penyelesaian berbagai kendala implementasi.

Referensi

- Azhar, Y. (2026, Januari 14). Hunian tetap korban banjir Sumatera dibangun di 197 lokasi. rumah rusak 189.308 unit, https://housingestate.id/read/2026/01/13/hunian-tetap-korban-banjir-sumatera-dibangun-di-197-lokasi-rumah-rusak-189-308-unit/
- Dewi, A.P. (2025, Desember 28). BNPB dampingi penyusunan dokumen RP3 13 pemda di Sumbar, *Antranews*. https://www.antaranews.com/berita/5324455/bnpb-dampingi-penyusunan-dokumen-rp3-13-pemda-di-sumbar?
- Home ministry urges swift data, land readiness for Sumatra housing. (2025, Desember 27). *Antranews*. https://en.antaranews.com/news/397813/home-ministry-urges-swift-data-land-readiness-for-sumatra-housing?
- Indonesia estimates $3 billion for Sumatra disaster recovery. (2025, Desember 13). *Antranews*. https://en.antaranews.com/news/396484/indonesia-estimates-3-billion-for-sumatra-disaster-recovery?
- Kemenko PMK. (2025, Desember 31). https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-perkuat-integrasi-data-kebencanaan-sumatera-melalui-dasbor-terpadu?
- Sebanyak 147 ribu rumah rusak akibat bencana di tiga provinsi. (2025, Desember 16). *Antranews*. https://www.antaranews.com/berita/5308222/sebanyak-147-ribu-rumah-rusak-akibat-bencana-di-tiga-provinsi?
- World Risk Report. (2024). WorldRiskReport 2024, https://weltrisikobericht.de/wp-content/uploads/2024/09/WorldRiskReport_2024.pdf?
- Zulfikar, M. (2025, Juni 26). Pakar sebut pentingnya "build back better" bagi rumah di zona bencana, *Antranews*. https://www.antaranews.com/berita/4927897/pakar-sebut-pentingnya-build-back-better-bagi-rumah-di-zona-bencana?

© 2009

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.